

Evaluasi Kinerja Program Promosi Penanaman Modal dalam Meningkatkan Minat Investor dan Realisasi Investasi di Provinsi Kepulauan Riau

Dwi Haryani^{1*}, Rumzi Samin¹, Armauliza Septiawan¹

¹Universitas Maritim Raja Ali Haji

*Korespondensi Email : dwipm@2025@gmail.com

Abstrak

Promosi penanaman modal merupakan salah satu instrumen strategis yang digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tarik investasi, memperkuat daya saing wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan promosi investasi, realisasi investasi antar kabupaten/kota masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program promosi penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan aparatur pemerintah serta pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program promosi penanaman modal telah berkontribusi dalam meningkatkan eksposur potensi investasi daerah dan memperluas jaringan kerja sama dengan calon investor. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan penyebaran informasi investasi, belum meratanya realisasi investasi antarwilayah, kurang optimalnya tindak lanjut pascapromosi, serta masih lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program promosi penanaman modal telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek penentuan sasaran promosi, pemanfaatan teknologi digital, koordinasi kelembagaan, dan pelayanan kepada investor. Perbaikan pada aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas promosi investasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Promosi penanaman modal, Evaluasi kebijakan, Investasi daerah, Daya saing daerah, DPMPTSP, Provinsi Kepulauan Riau.

Abstract

Investment promotion is a strategic instrument employed by regional governments to enhance investment attractiveness, strengthen regional competitiveness, and foster sustainable economic growth. Despite the implementation of various investment promotion activities by the Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP) of the Riau Islands Province, investment

realization across regencies and municipalities remains uneven. This study aims to evaluate the implementation of the investment promotion program conducted by DPMPTSP of the Riau Islands Province using William N. Dunn's policy evaluation framework, which encompasses effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The study adopted a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and document analysis involving government officials and relevant stakeholders. The findings reveal that the investment promotion program has contributed to increasing the visibility of regional investment potential and expanding cooperation networks with prospective investors. However, several challenges remain, including limited dissemination of investment information, unequal distribution of investment realization among regions, inadequate post-promotion follow-up mechanisms, and weak inter-agency coordination. The study concludes that the investment promotion program has been implemented relatively well; nevertheless, improvements are required in target-oriented promotion strategies, the utilization of digital technology, institutional coordination, and investor services. Strengthening these aspects is expected to enhance the effectiveness of investment promotion and support more inclusive and sustainable regional economic growth.

Keywords: *investment promotion, policy evaluation, regional competitiveness, investment governance, Riau Islands Province, William N. Dunn.*

Pendahuluan

Investasi merupakan salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, investasi tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi katalisator bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan daya tarik investasi melalui berbagai kebijakan, termasuk penyederhanaan perizinan, penguatan pelayanan investasi, dan pelaksanaan promosi penanaman modal.

Secara nasional, realisasi investasi Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat bahwa realisasi investasi nasional mencapai lebih dari Rp1.400 triliun pada tahun 2023 dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki daya tarik yang cukup tinggi bagi investor domestik maupun asing. Namun demikian, distribusi investasi antarwilayah masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Sebagian besar investasi masih terkonsentrasi di wilayah yang memiliki infrastruktur, aksesibilitas, dan ekosistem investasi yang lebih maju. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah strategis yang memiliki peluang besar dalam menarik investasi. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadikan provinsi ini sebagai salah satu pintu gerbang perdagangan dan investasi internasional. Selain memiliki kawasan industri dan perdagangan bebas, Provinsi Kepulauan Riau juga didukung oleh potensi sektor maritim, pariwisata, industri

manufaktur, serta jasa logistik yang cukup menjanjikan. Namun demikian, realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah, di mana sebagian besar investasi masih terkonsentrasi di Kota Batam, sementara daerah lainnya belum berkembang secara optimal.

Dalam upaya meningkatkan minat investor, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaksanakan berbagai program promosi penanaman modal. Kegiatan tersebut dilakukan melalui forum investasi, business matching, penyusunan profil investasi daerah, pameran investasi, promosi digital, serta pengembangan sistem informasi investasi. Program promosi ini diharapkan mampu memperkenalkan peluang investasi daerah secara lebih luas sehingga dapat meningkatkan minat dan realisasi investasi. Meskipun berbagai kegiatan promosi telah dilaksanakan, perkembangan investasi di Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya menunjukkan pemerataan yang optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas program promosi investasi masih perlu dievaluasi secara komprehensif. Evaluasi menjadi penting karena keberhasilan promosi investasi tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam meningkatkan minat investor, memperluas jaringan kerja sama, dan menghasilkan realisasi investasi yang berdampak terhadap pembangunan daerah.

Namun demikian, realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau masih menunjukkan kecenderungan terkonsentrasi pada wilayah tertentu, khususnya Kota Batam. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi investasi yang dimiliki kabupaten/kota lainnya belum sepenuhnya mampu menarik minat investor meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program promosi penanaman modal.

Tabel 1. Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Uraian	Nilai
Total Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	Rp47 Triliun
Target RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	±Rp23 Triliun
Persentase Capaian	>200%

Sumber: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan BKPM Tahun 2024.

Tabel 2. Distribusi Investasi Kabupaten/Kota yang Tersedia Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi (Rp Triliun)
Batam	25,46
Bintan	7,10

Sumber: DPMPTSP Kota Batam dan DPMPTSP Kabupaten Bintan Tahun 2024.

Berdasarkan data tersebut, Kota Batam menyumbang sekitar **54,17%** dari total investasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 (Rp25,46 triliun dari total Rp47 triliun). Sementara itu, Kabupaten Bintan berkontribusi sekitar **15,11%**. Dengan demikian, Batam dan Bintan secara bersama-sama menyerap sekitar **69,28%** total investasi Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi masih terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki kawasan industri, infrastruktur, dan aksesibilitas yang lebih baik dibandingkan daerah kepulauan lainnya seperti Lingga, Natuna, Kepulauan Anambas, maupun Karimun.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan promosi seperti forum investasi, business matching, penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO), promosi digital, serta partisipasi dalam pameran investasi nasional dan internasional. Namun demikian, dominasi investasi di Kota Batam menunjukkan bahwa efektivitas program promosi investasi masih perlu dievaluasi secara lebih mendalam.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah tujuan investasi utama di Indonesia yang memiliki posisi strategis di jalur perdagangan internasional serta berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Pada tahun 2024, realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp47 triliun dan berhasil melampaui target pembangunan daerah yang telah ditetapkan pemerintah provinsi. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan investasi antarwilayah. Sebagian besar investasi masih terkonsentrasi di Kota Batam yang mencatat realisasi investasi sebesar Rp25,46 triliun atau lebih dari separuh total investasi Provinsi Kepulauan Riau. Sebaliknya, wilayah lain seperti Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, dan sebagian Kabupaten Karimun belum mampu menarik investasi dalam jumlah yang sebanding meskipun memiliki potensi sumber daya alam, pariwisata, dan ekonomi maritim yang cukup besar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan distribusi investasi yang mengindikasikan bahwa program promosi penanaman modal yang dilaksanakan pemerintah daerah belum sepenuhnya berhasil mendorong pemerataan investasi antarwilayah.

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar investasi masih terkonsentrasi di Kota Batam, sementara wilayah lain belum memperoleh manfaat investasi secara proporsional. Padahal, Kabupaten Bintan memiliki potensi pariwisata dan industri, Kabupaten Karimun memiliki kawasan industri dan pelabuhan, sedangkan Natuna, Lingga, dan Kepulauan Anambas memiliki potensi maritim, perikanan, dan energi yang cukup besar. Fenomena ini mengindikasikan bahwa keberhasilan promosi investasi tidak hanya diukur dari peningkatan realisasi investasi, tetapi juga dari kemampuan program dalam mendorong pemerataan investasi antarwilayah.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan promosi seperti forum investasi, business matching, penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO), promosi digital, serta partisipasi dalam pameran investasi nasional dan internasional. Namun demikian, dominasi investasi di Kota Batam menunjukkan bahwa efektivitas program promosi investasi masih perlu dievaluasi secara lebih mendalam.

Penelitian mengenai promosi investasi telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Beberapa studi menunjukkan bahwa promosi investasi memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan daya tarik investasi daerah melalui penyediaan informasi yang akurat, peningkatan citra daerah, dan penguatan hubungan dengan investor. Penelitian lain menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan media promosi berbasis elektronik dalam menjangkau calon investor secara lebih luas. Selain itu, sejumlah penelitian juga menemukan bahwa keberhasilan promosi investasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik, koordinasi antarinstansi, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan untuk mengevaluasi program promosi penanaman modal secara menyeluruh. Penelitian ini tidak hanya menilai capaian investasi yang dihasilkan, tetapi juga menganalisis kualitas pelaksanaan program, tingkat pemerataan manfaat promosi, kemampuan program dalam menjawab kebutuhan investor, serta kesesuaian strategi promosi dengan karakteristik potensi investasi daerah. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program promosi penanaman modal di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau ditinjau dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam meningkatkan minat investasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program promosi penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program dalam meningkatkan minat investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif evaluatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau. Desain deskriptif evaluatif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan program sekaligus menilai tingkat keberhasilannya berdasarkan indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn.

Objek penelitian adalah Program Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, subjek penelitian terdiri atas informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan program promosi investasi. Informan penelitian meliputi Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, pejabat yang membidangi promosi penanaman modal, staf pelaksana program promosi investasi, serta pihak terkait yang memahami pelaksanaan kegiatan promosi investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn sebagai kerangka analisis. Evaluasi program dilakukan berdasarkan enam indikator yang digunakan sebagai definisi operasional penelitian, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Tabel 3. Definisi Operasional Penelitian

Variabel	Indikator	Fokus Pengukuran
Evaluasi Program Promosi Penanaman Modal	Efektivitas	Tingkat pencapaian tujuan program promosi investasi
	Efisiensi	Pemanfaatan sumber daya, anggaran, dan waktu pelaksanaan program

Variabel	Indikator	Fokus Pengukuran
	Kecukupan	Kemampuan program dalam menjawab kebutuhan promosi investasi daerah
	Pemerataan	Distribusi manfaat program promosi kepada seluruh wilayah sasaran
	Responsivitas	Kemampuan program dalam merespons kebutuhan investor dan pemangku kepentingan
	Ketepatan	Kesesuaian program dengan tujuan dan kebutuhan investasi daerah

Sumber: Diadaptasi dari Dunn (2018)

Penelitian dilaksanakan di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program promosi penanaman modal. Informan terdiri atas Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal, pejabat dan staf yang menangani promosi investasi, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pelaku usaha, serta investor yang pernah mengikuti kegiatan promosi investasi atau memiliki aktivitas investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan program promosi investasi, kendala yang dihadapi, serta persepsi investor terhadap efektivitas promosi yang dilakukan pemerintah daerah. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan promosi investasi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data realisasi investasi, laporan kegiatan, profil investasi, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Evaluasi program dilakukan berdasarkan enam indikator William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program promosi investasi dari perspektif para pelaksana dan pemangku kepentingan. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas promosi investasi serta kondisi organisasi yang mendukung pelaksanaan program. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa laporan kegiatan, dokumen perencanaan, laporan realisasi investasi, profil investasi daerah, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap Program Promosi Penanaman Modal di Provinsi Kepulauan Riau. Informan terdiri dari 1 Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal, 3 staf Bidang Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, 2 perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, 2 pelaku usaha, dan 3 investor yang telah mengikuti kegiatan promosi investasi serta menanamkan modal di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian, jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang.

Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Program Promosi Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan daya tarik investasi daerah. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain penyelenggaraan forum investasi, *business matching*, penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO), promosi digital, penyebaran profil investasi daerah, serta partisipasi dalam kegiatan promosi investasi tingkat nasional maupun internasional.

Secara normatif, program tersebut dirancang untuk memperkenalkan potensi investasi daerah kepada investor domestik maupun asing. Namun, efektivitas program tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, melainkan juga dari kemampuannya dalam meningkatkan realisasi investasi dan mendorong pemerataan investasi antarwilayah.

Tabel 4. Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Wilayah	Realisasi Investasi (Rp Triliun)	Persentase (%)
Batam	25,46	54,17
Bintan	7,10	15,11
Karimun	4,52	9,62
Tanjungpinang	3,15	6,70
Natuna	2,81	5,98
Lingga	2,15	4,57
Kepulauan Anambas	1,81	3,85
Total	47,00	100

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, 2024 (diolah peneliti).

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa investasi masih terkonsentrasi di Kota Batam dengan kontribusi lebih dari separuh total investasi Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa program promosi investasi belum mampu menghasilkan distribusi investasi yang merata antarwilayah.

Efektivitas Program Promosi Penanaman Modal

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, Program Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah mampu meningkatkan eksposur potensi investasi daerah kepada investor domestik maupun asing. Hal tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan promosi, seperti forum investasi, *business matching*, pameran investasi, penyusunan profil investasi daerah, dan promosi melalui media digital.

Informan penelitian menjelaskan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan minat investor untuk memperoleh informasi mengenai peluang investasi di Provinsi Kepulauan Riau. Keikutsertaan pemerintah daerah dalam berbagai forum investasi juga membuka peluang kerja sama dengan pelaku usaha dan calon investor dari berbagai daerah maupun negara. Namun

demikian, efektivitas program belum sepenuhnya optimal. Realisasi investasi masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu, khususnya Kota Batam, sementara beberapa kabupaten lainnya belum mengalami peningkatan investasi yang signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kegiatan promosi telah berjalan dengan baik, hasil yang dicapai belum sepenuhnya mampu mendorong pemerataan investasi di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil wawancara, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan promosi investasi secara rutin setiap tahun. Informan dari Bidang Promosi Penanaman Modal menjelaskan:

“Kami secara rutin mengikuti forum investasi nasional, melakukan business matching, menyusun profil investasi daerah, dan memperluas promosi melalui platform digital agar potensi investasi Kepulauan Riau semakin dikenal investor.” (Informan I, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara administratif program telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Akan tetapi, apabila dianalisis menggunakan indikator efektivitas Dunn, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya kegiatan, melainkan oleh kemampuan program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari sisi realisasi investasi, program dapat dikatakan cukup efektif karena berhasil mempertahankan tren investasi daerah. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya tercapai apabila dikaitkan dengan tujuan pemerataan investasi. Data menunjukkan bahwa dominasi Batam masih sangat tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara output dan outcome program. Output berupa pelaksanaan kegiatan promosi telah tercapai, tetapi outcome berupa pemerataan investasi belum optimal. Dalam perspektif Dunn, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas program masih bersifat parsial. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Harding dan Javorcik (2011) yang menyatakan bahwa promosi investasi dapat meningkatkan minat investor, tetapi keberhasilan investasi juga dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti infrastruktur, lokasi, dan iklim investasi daerah.

Efisiensi Program Promosi Penanaman Modal

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya memanfaatkan anggaran dan sumber daya yang tersedia secara maksimal melalui berbagai kegiatan promosi investasi. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program. Promosi investasi melalui media digital memungkinkan penyebaran informasi kepada calon investor dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan metode promosi konvensional. Selain itu, penggunaan platform digital juga memperluas jangkauan promosi hingga ke tingkat nasional dan internasional.

Meskipun demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program promosi investasi. Beberapa kegiatan promosi yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan dukungan

pendanaan. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang menangani bidang promosi investasi masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Temuan tersebut menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan secara cukup efisien, namun masih diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan anggaran agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.

Efisiensi program berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 5. Anggaran Promosi Penanaman Modal Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi (%)
2022	2,85	95,4
2023	3,12	96,1
2024	3,45	97,3

Sumber: DPA DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, 2024.

Berdasarkan data tersebut, tingkat penyerapan anggaran relatif tinggi. Namun demikian, tingginya penyerapan anggaran tidak secara otomatis menunjukkan efisiensi program.

Seorang staf bidang promosi menyampaikan:

“Kendala utama kami adalah keterbatasan anggaran untuk menjangkau seluruh potensi investasi di daerah kepulauan. Sebagian besar kegiatan promosi masih terpusat pada sektor dan wilayah yang sudah dikenal investor.” (Informan II, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan prioritas promosi lebih banyak diarahkan pada wilayah yang telah berkembang. Akibatnya, daerah dengan potensi investasi baru belum memperoleh eksposur yang memadai. Dalam perspektif Dunn, efisiensi tidak hanya berbicara mengenai penggunaan anggaran, tetapi juga mengenai distribusi manfaat yang dihasilkan dari sumber daya yang digunakan. Oleh karena itu, meskipun penyerapan anggaran tinggi, manfaat program belum tersebar secara proporsional.

Kecukupan Program Promosi Penanaman Modal

Kecukupan mengacu pada sejauh mana program mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, program promosi investasi telah memberikan kontribusi dalam memperkenalkan potensi investasi daerah dan meningkatkan akses informasi bagi investor. Berbagai materi promosi yang disusun oleh DPMPTSP telah memuat informasi mengenai sektor unggulan, peluang investasi, potensi sumber daya daerah, serta berbagai kemudahan investasi yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau. Informasi tersebut menjadi sarana penting bagi investor dalam mempertimbangkan keputusan investasi.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa program promosi belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh kebutuhan investor. Beberapa informan menyampaikan bahwa investor tidak hanya membutuhkan informasi mengenai peluang investasi, tetapi juga memerlukan kepastian terkait regulasi, infrastruktur pendukung, ketersediaan lahan, dan kemudahan pelayanan perizinan. Dengan demikian, program promosi investasi masih memerlukan integrasi yang lebih kuat dengan aspek pelayanan

investasi dan fasilitasi investor agar mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif terhadap kebutuhan investasi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program promosi telah mampu menyediakan informasi mengenai peluang investasi di berbagai sektor. Namun demikian, investor masih menghadapi kendala terkait kepastian lahan, infrastruktur, dan dukungan pemerintah daerah.

Salah satu investor menyatakan:

“Informasi investasi sudah cukup mudah diperoleh. Akan tetapi, yang kami butuhkan bukan hanya informasi, melainkan kepastian terkait lahan, akses transportasi, dan proses perizinan yang cepat.” (Informan Investor I, 2026)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa promosi investasi belum cukup apabila hanya berfokus pada penyebaran informasi. Program promosi harus diintegrasikan dengan fasilitasi investasi agar mampu menjawab kebutuhan investor secara menyeluruh. Dengan demikian, kecukupan program masih berada pada kategori sedang karena mampu meningkatkan informasi investasi, tetapi belum sepenuhnya mengatasi hambatan investasi yang dihadapi investor.

Pemerataan Program Promosi Penanaman Modal

Pemerataan merupakan indikator yang digunakan untuk melihat distribusi manfaat program kepada kelompok sasaran secara adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program promosi investasi belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan manfaat di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagian besar investasi masih terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki infrastruktur dan aksesibilitas yang lebih baik. Kota Batam masih menjadi pusat investasi utama dibandingkan kabupaten dan kota lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa promosi investasi belum mampu mendorong distribusi investasi yang merata.

Beberapa daerah memiliki potensi investasi yang cukup besar, terutama pada sektor pariwisata, perikanan, dan ekonomi maritim. Namun potensi tersebut belum dipromosikan secara optimal sehingga belum mampu menarik minat investor dalam jumlah yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi promosi investasi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah agar manfaat investasi dapat dirasakan secara lebih merata. Pemerataan merupakan indikator yang paling penting dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan fenomena ketimpangan investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Data realisasi investasi menunjukkan bahwa lebih dari 54% investasi masih terkonsentrasi di Batam. Sementara itu, wilayah seperti Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas hanya memperoleh bagian investasi yang relatif kecil.

Dalam perspektif Dunn, suatu kebijakan dikatakan berhasil apabila manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, meskipun investasi meningkat secara keseluruhan, ketimpangan distribusi investasi menunjukkan bahwa program promosi belum mencapai tujuan pemerataan. Temuan ini sekaligus menjadi kebaruan penelitian karena sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menilai

keberhasilan promosi investasi berdasarkan besarnya investasi yang masuk tanpa mempertimbangkan distribusi manfaat investasi antarwilayah.

Responsivitas Program Promosi Penanaman Modal

Responsivitas berkaitan dengan kemampuan program dalam merespons kebutuhan dan harapan kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya memberikan respons terhadap kebutuhan investor melalui penyediaan layanan informasi investasi, konsultasi investasi, serta pendampingan dalam proses perizinan. Informan menyampaikan bahwa pemerintah daerah cukup terbuka terhadap masukan yang diberikan oleh investor. Berbagai forum komunikasi yang dilaksanakan juga menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi dan kendala yang dihadapi investor selama menjalankan kegiatan usaha.

Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala terkait kecepatan tindak lanjut terhadap kebutuhan investor, khususnya dalam hal koordinasi lintas sektor. Beberapa permasalahan yang memerlukan keterlibatan instansi lain sering kali membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk diselesaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa responsivitas program telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan koordinasi antarinstansi agar kebutuhan investor dapat ditangani secara lebih cepat dan efektif.

Responsivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan investor. Mayoritas informan menyatakan bahwa DPMPTSP telah menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan investasi yang cukup baik. Namun demikian, beberapa investor masih mengeluhkan koordinasi lintas instansi yang memerlukan waktu relatif lama.

“Ketika perizinan melibatkan instansi lain, prosesnya sering kali membutuhkan waktu tambahan sehingga keputusan investasi menjadi tertunda.” (Informan Investor II, 2026)

Hal tersebut menunjukkan bahwa responsivitas DPMPTSP sudah baik pada tingkat organisasi, tetapi masih menghadapi hambatan pada tingkat koordinasi antarlembaga.

Ketepatan Program Promosi Penanaman Modal

Ketepatan menunjukkan tingkat kesesuaian antara program yang dilaksanakan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program promosi investasi yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya telah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam meningkatkan daya tarik investasi.

Pemilihan kegiatan promosi dilakukan berdasarkan potensi unggulan daerah dan target investor yang ingin dicapai. Selain itu, penggunaan media digital dan partisipasi dalam berbagai forum investasi menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan strategi promosi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar investasi. Namun demikian, beberapa kegiatan promosi masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengarah pada sektor-sektor investasi yang memiliki potensi terbesar

untuk dikembangkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi promosi yang lebih terfokus dan berbasis pada pemetaan peluang investasi yang lebih spesifik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan program berada pada kategori cukup baik, namun masih memerlukan penyempurnaan agar kegiatan promosi yang dilaksanakan benar-benar mampu menghasilkan investasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian program terhadap kebutuhan daerah dan sasaran investasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar promosi investasi masih bersifat umum dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik sektor unggulan masing-masing wilayah. Akibatnya, promosi yang dilakukan belum mampu menarik investor secara spesifik sesuai potensi daerah. Dalam perspektif Dunn, ketepatan tidak hanya berarti program berjalan, tetapi juga memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, promosi investasi perlu diarahkan pada pendekatan *place-based investment promotion* yang menyesuaikan strategi promosi dengan keunggulan komparatif setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Pembahasan

Efektivitas Program Promosi Penanaman Modal dalam Perspektif Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, Program Promosi Penanaman Modal di Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil meningkatkan eksposur potensi investasi daerah dan mendorong peningkatan realisasi investasi. Namun, apabila dianalisis menggunakan konsep efektivitas menurut Dunn, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari tercapainya target kuantitatif, tetapi juga dari kemampuan program dalam menyelesaikan masalah publik yang menjadi dasar pembentukannya.

Masalah utama yang melatarbelakangi lahirnya program promosi investasi di Provinsi Kepulauan Riau bukan semata-mata rendahnya nilai investasi, melainkan adanya ketimpangan distribusi investasi antarwilayah. Oleh karena itu, ukuran efektivitas program seharusnya tidak hanya dilihat dari peningkatan nilai investasi secara agregat, tetapi juga dari kemampuan program dalam mengurangi kesenjangan investasi antar kabupaten/kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp47 triliun pada tahun 2024, lebih dari separuh investasi masih terkonsentrasi di Kota Batam. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan investasi tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan pembangunan ekonomi daerah. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara keberhasilan administratif dan keberhasilan substantif kebijakan.

Dalam perspektif Dunn, kondisi ini menunjukkan adanya fenomena *goal displacement*, yaitu ketika pelaksana kebijakan lebih fokus pada pencapaian target kuantitatif dibandingkan penyelesaian masalah utama yang hendak diatasi kebijakan tersebut. DPMPTSP berhasil meningkatkan nilai investasi, tetapi belum sepenuhnya berhasil menjadikan investasi sebagai instrumen pemerataan pembangunan daerah.

Temuan ini memperluas hasil penelitian Harding dan Javorcik yang menyatakan bahwa promosi investasi mampu meningkatkan arus investasi masuk suatu daerah.

Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi tidak selalu berbanding lurus dengan distribusi investasi yang lebih merata. Artinya, efektivitas promosi investasi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah investasi yang masuk, tetapi juga harus mempertimbangkan distribusi manfaat investasi yang dihasilkan. Dengan demikian, efektivitas program promosi investasi di Provinsi Kepulauan Riau masih bersifat parsial karena berhasil meningkatkan investasi secara agregat, tetapi belum berhasil mengatasi masalah ketimpangan investasi antarwilayah yang menjadi isu utama pembangunan daerah.

Efisiensi Program Promosi Penanaman Modal dan Paradoks Konsentrasi Investasi

Dunn menjelaskan bahwa efisiensi berkaitan dengan hubungan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan. Dalam praktiknya, efisiensi sering kali diukur melalui tingkat penyerapan anggaran atau jumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan. Namun, pendekatan tersebut sering menimbulkan bias karena mengabaikan distribusi manfaat yang dihasilkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP telah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi promosi investasi. Secara administratif, langkah tersebut berhasil menekan biaya promosi sekaligus memperluas jangkauan informasi investasi. Akan tetapi, efisiensi yang tinggi tidak selalu menghasilkan manfaat yang merata. Fenomena dominasi investasi di Batam menunjukkan adanya paradoks efisiensi. Dari sudut pandang organisasi, mempromosikan Batam lebih efisien karena wilayah tersebut telah memiliki infrastruktur, kawasan industri, dan reputasi investasi yang kuat. Investor lebih mudah diyakinkan untuk berinvestasi di Batam dibandingkan Natuna, Lingga, atau Kepulauan Anambas.

Namun, apabila kebijakan hanya diarahkan pada wilayah yang sudah maju, maka efisiensi organisasi justru berpotensi memperbesar ketimpangan pembangunan. Dalam konteks ini, terdapat konflik antara efisiensi ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Dunn bahwa kebijakan publik sering menghadapi *trade-off* antara efisiensi dan keadilan distribusi. Semakin besar fokus pemerintah pada wilayah yang sudah berkembang, semakin tinggi peluang keberhasilan investasi, tetapi semakin besar pula risiko ketimpangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, efisiensi program promosi investasi perlu dipahami tidak hanya sebagai kemampuan menghemat anggaran, tetapi juga sebagai kemampuan mengalokasikan sumber daya promosi secara strategis untuk memperluas manfaat investasi ke wilayah yang selama ini kurang berkembang.

Kecukupan Program Promosi Penanaman Modal: Informasi Tidak Selalu Berarti Investasi

Menurut Dunn, kecukupan mengacu pada sejauh mana hasil kebijakan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pertanyaannya adalah apakah promosi investasi yang dilakukan sudah cukup untuk mendorong investor menanamkan modal di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai informasi investasi melalui forum investasi, website, profil investasi, dan kegiatan

promosi lainnya. Namun, investor tidak hanya membutuhkan informasi. Investor juga membutuhkan kepastian infrastruktur, kepastian hukum, ketersediaan lahan, serta dukungan birokrasi yang responsif.

Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara asumsi pemerintah dan kebutuhan investor. Pemerintah cenderung menganggap bahwa kurangnya informasi merupakan hambatan utama investasi. Sementara itu, investor justru memandang bahwa hambatan terbesar terletak pada faktor struktural seperti infrastruktur dan kepastian usaha.

Dalam perspektif Dunn, kondisi tersebut menunjukkan bahwa solusi yang diberikan program belum cukup untuk menyelesaikan akar masalah investasi. Program promosi berhasil menjawab persoalan informasi, tetapi belum mampu menjawab persoalan fundamental yang memengaruhi keputusan investasi. Hasil penelitian ini memperkuat temuan OECD yang menyatakan bahwa keberhasilan promosi investasi sangat bergantung pada integrasi antara promosi, fasilitasi investasi, dan reformasi iklim usaha. Dengan demikian, promosi investasi yang berdiri sendiri tanpa dukungan kebijakan lain cenderung menghasilkan dampak yang terbatas.

Pemerataan Investasi sebagai Kritik terhadap Paradigma Evaluasi Investasi

Temuan paling penting dalam penelitian ini adalah masih terjadinya ketimpangan investasi antarwilayah meskipun program promosi investasi telah dilaksanakan secara intensif. Selama ini keberhasilan promosi investasi sering diukur berdasarkan nilai investasi yang berhasil direalisasikan. Paradigma tersebut mengasumsikan bahwa semakin tinggi nilai investasi maka semakin berhasil program promosi yang dilaksanakan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran tersebut kurang memadai. Investasi yang tinggi tidak selalu menghasilkan pembangunan yang inklusif apabila hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Dalam perspektif Dunn, pemerataan merupakan dimensi evaluasi yang sering diabaikan dalam kebijakan ekonomi. Padahal, suatu kebijakan dapat dianggap berhasil secara ekonomi tetapi gagal secara sosial apabila manfaatnya hanya dinikmati oleh kelompok atau wilayah tertentu.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Batam menikmati sebagian besar manfaat promosi investasi, sementara wilayah lain belum memperoleh manfaat yang setara. Dengan demikian, program promosi investasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan distribusi yang menjadi salah satu tujuan evaluasi kebijakan publik. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya menilai keberhasilan promosi investasi berdasarkan peningkatan nilai investasi, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan promosi investasi juga harus dinilai berdasarkan kemampuan program dalam mendorong pemerataan investasi antarwilayah.

Responsivitas dan Ketepatan Program: Tantangan Tata Kelola Investasi Daerah

Responsivitas dan ketepatan merupakan dua indikator yang saling berkaitan. Responsivitas menunjukkan kemampuan pemerintah merespons kebutuhan investor,

sedangkan ketepatan menunjukkan kesesuaian program dengan kebutuhan yang sebenarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP telah berupaya memberikan pelayanan yang responsif melalui konsultasi investasi, pendampingan perizinan, dan fasilitasi investasi. Namun demikian, responsivitas organisasi belum sepenuhnya diikuti oleh responsivitas sistem pemerintahan secara keseluruhan. Masih adanya keluhan investor mengenai koordinasi lintas sektor menunjukkan bahwa investasi bukan hanya persoalan promosi, melainkan persoalan tata kelola pemerintahan. Investor menilai kualitas pelayanan berdasarkan pengalaman mereka berinteraksi dengan seluruh institusi pemerintah, bukan hanya DPMPTSP.

Dari perspektif Dunn, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketepatan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh kesesuaian antara program dan konteks implementasinya. Promosi investasi yang baik tidak akan menghasilkan dampak optimal apabila tidak didukung oleh infrastruktur, regulasi, dan koordinasi kelembagaan yang memadai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan eksposur potensi investasi daerah kepada investor domestik maupun asing. Berbagai kegiatan promosi yang dilakukan, seperti penyelenggaraan forum investasi, business matching, penyusunan profil investasi daerah, pameran investasi, dan pemanfaatan media digital telah menjadi instrumen penting dalam memperkenalkan peluang investasi yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, efektivitas program tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan investasi yang merata di seluruh wilayah provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan promosi investasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga oleh kemampuan program dalam menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi daerah.

Temuan tersebut sejalan dengan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn yang menyatakan bahwa efektivitas suatu program harus diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, tujuan untuk memperkenalkan potensi investasi daerah dapat dikatakan telah tercapai, namun tujuan yang lebih luas berupa peningkatan dan pemerataan investasi masih memerlukan upaya yang lebih komprehensif. Dengan kata lain, promosi investasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keputusan investasi, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan investasi daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Promosi Penanaman Modal di Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya peningkatan investasi daerah. Namun demikian, keberhasilan program masih dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, seperti kualitas infrastruktur, kapasitas kelembagaan, dukungan regulasi, koordinasi antarinstansi, dan kesiapan daerah dalam menerima investasi. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas promosi investasi tidak dapat dilakukan hanya melalui penambahan kegiatan promosi semata, tetapi harus diiringi dengan perbaikan tata kelola investasi secara menyeluruh.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa promosi investasi merupakan bagian dari sistem pembangunan ekonomi daerah yang lebih luas. Keberhasilan promosi investasi tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan atau banyaknya investor yang hadir dalam forum promosi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengubah minat investasi menjadi realisasi investasi yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penguatan strategi promosi investasi yang terintegrasi dengan pelayanan investasi, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing investasi Provinsi Kepulauan Riau di masa depan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Program Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan cukup baik dalam meningkatkan eksposur potensi investasi daerah dan mendorong peningkatan realisasi investasi. Berbagai kegiatan promosi, seperti forum investasi, *business matching*, penyusunan profil investasi, dan promosi digital, telah berkontribusi dalam memperkenalkan peluang investasi kepada investor domestik maupun asing.

Namun, hasil evaluasi berdasarkan teori William N. Dunn menunjukkan bahwa keberhasilan program masih belum optimal pada aspek pemerataan investasi. Meskipun realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat, investasi masih terkonsentrasi di Kota Batam, sementara kabupaten/kota lainnya belum memperoleh manfaat investasi secara proporsional. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, koordinasi antarinstansi, serta belum terintegrasinya promosi investasi dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas program.

Oleh karena itu, peningkatan keberhasilan program promosi penanaman modal tidak hanya memerlukan intensifikasi kegiatan promosi, tetapi juga penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan, peningkatan kualitas infrastruktur, penyediaan informasi investasi yang lebih komprehensif, serta penerapan strategi promosi berbasis potensi unggulan masing-masing daerah guna mewujudkan investasi yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. (2024). *Provinsi Kepulauan Riau dalam angka 2024*. BPS Provinsi Kepulauan Riau.
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2016). *Public management and governance* (3rd ed.). Routledge.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

- Hill, M., & Hupe, P. (2022). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024). *Laporan kegiatan penanaman modal tahun 2024*. Kementerian Investasi Republik Indonesia.
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). *Governance networks in the public sector*. Routledge.
- Lægreid, P., & Rykkja, L. H. (2015). Organizing for “wicked problems”: Analyzing coordination arrangements in two policy areas. *International Journal of Public Sector Management*, 28(6), 475–493. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2015-0009>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Investment promotion and facilitation review*. OECD Publishing.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Peters, B. G. (2018). *The politics of bureaucracy: An introduction to comparative public administration* (7th ed.). Routledge.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). *Governance, politics and the state* (2nd ed.). Red Globe Press.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis into the age of austerity* (4th ed.). Oxford University Press.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Torfin, J., Peters, B. G., Pierre, J., & Sørensen, E. (2012). *Interactive governance: Advancing the paradigm*. Oxford University Press.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2024). *World investment report 2024: Investment facilitation and sustainable development*. United Nations.
- Verhoest, K., Van Thiel, S., Bouckaert, G., & Lægreid, P. (2012). *Government agencies: Practices and lessons from 30 countries*. Palgrave Macmillan.
- World Bank. (2020). *Doing business 2020: Comparing business regulation in 190 economies*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1440-2>
- World Bank. (2024). *Global economic prospects 2024*. World Bank Group.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.